

Transformasi Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Sriyanto¹, Alfitri², Slamet Widodo³, Sriati⁴

^{1,2,3,4}Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

Koresponding Email: yanki032001@gmail.com

ABSTRAK

Konsep revolusi ilmiah dari Thomas Kuhn memiliki karakteristik pemikiran dan model filsafat baru yang berpengaruh terhadap sejarah lahirnya ilmu pengetahuan dan filsafat sains. Konsep tersebut juga berpengaruh dalam proses konstruksi maupun rekonstruksi munculnya ilmu pengetahuan baru. Menurut Thomas Kuhn sejarah ilmu pengetahuan digunakan sebagai starting point kajian permasalahan fundamental dalam epistemologi keilmuan. Hal tersebut dikarenakan sains prinsipnya selalu ditandai dengan kuatnya paradigma dan revolusi ilmiah yang terjadi setelah adanya anomaly dan krisis. Fase ini kemudian didefinisikan oleh Thomas Kuhn sebagai fase sejarah lahirnya ilmu pengetahuan baru, dimulai dengan normal science, kemudian terjadi anomali dan krisis. Dengan adanya hal tersebut, kemudian muncul revolusi ilmiah yang menyebabkan lahirnya ilmu pengetahuan baru. Konsep Thomas Kuhn tersebut relevan dengan pengembangan keilmuan operasi pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) dengan tujuan membangun keterbukaan pengembangan operasi pemeliharaan perdamaian dunia terhadap anomali dan krisis serta munculnya revolusi dalam ilmu operasi pemeliharaan perdamaian dunia sehingga memotivasi munculnya paradigma baru di dalam pengembangan konsep operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Berbagai pendekatan dalam studi operasi pemeliharaan perdamaian dunia dapat menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya normatif, historis, empiris dan pendekatan lainnya dalam rangka penyiapan kapabilitas pembangunan pasukan yang terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

Kata kunci: Thomas S. Kuhn, Paradigma, Operasi Pemeliharaan Perdamaian, Revolusi Ilmiah

ABSTRACT

The concept of scientific revolution from Thomas Kuhn has the characteristics of new philosophical thoughts and models that have influenced the history of the birth of science and the philosophy of science. This concept also influences the process of construction and reconstruction of the emergence of new knowledge. According to Thomas Kuhn, the history of science is used as a starting point for studying fundamental issues in scientific epistemology. This is because in principle science is always marked by a strong scientific paradigm and revolution that occurs after anomaly and crisis. This phase is then defined by Thomas Kuhn as the historical phase of the birth of new science, starting with normal science, then anomaly and crisis occur. With this in mind, a scientific revolution emerged which led to the birth of new science. Thomas Kuhn's concept is relevant to the scientific development of world peacekeeping operations (peace keeping operations) with the aim of building openness in the development of world peacekeeping operations against anomalies and crises as well as the emergence of a revolution in the science of world peacekeeping operations so as to motivate

STUDIA ADMINISTRASI

the emergence of a new paradigm in the development of the concept of maintenance operations. world peace. Various approaches in the study of world peacekeeping operations can use several approaches, including normative, historical, empirical and other approaches in the framework of preparing the capability of building troops involved in world peacekeeping operations

Keywords: *Thomas S. Kuhn, Paradigm, Peacekeeping Operations, Scientific Revolution*

PENDAHULUAN

Perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris pada zaman filsafat Yunani merupakan periode penting dalam perubahan sejarah peradaban umat manusia. Alam semesta yang sebelumnya ditakuti dan dijauhi atas dasar mitos berubah menjadi semakin didekati, diteliti atau dikaji dan bahkan dieksploitasi. Manusia yang awalnya pasif berubah menjadi semakin aktif untuk melaksanakan penelitian atau kajian terhadap alam. Dengan demikian maka filsafat semakin terus berkembang, mulai dari masa kejayaan pada masa Aristoteles yang membedakan filsafat dalam teori dan praktis, kemunduran pada ujung zaman Helenisme karena perpecahan kerajaan Macedonia setelah wafatnya Alexander The Great, dan kebangkitannya kembali dengan munculnya zaman Renaissance atau era kelahiran kembali kebebasan manusia untuk berfikir. Mulai zaman tersebut epistemologi menjadi topik utama, dimana pertanyaan pokok dalam bidang ini adalah bagaimana pengetahuan diperoleh manusia dengan benar, serta apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri. Kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada sikap ilmiah serta harus dapat dibuktikan berdasarkan metode tertentu yang dapat diuji.

Kajian filsafat tidak dapat dipisahkan dari paradigma ilmu. Dalam kajian filsafat terdapat beberapa cabang, salah satu diantaranya adalah yang membahas tentang hakikat ilmu yaitu filsafat ilmu. Sedangkan, paradigma ilmu merupakan salah satu bagian dari filsafat ilmu, yang diperlukan untuk mencari pemahaman esensi dari epistemologi. Upaya untuk mencari pemahaman tersebut, salah satunya dapat ditempuh melalui pemahaman konsep-konsep dari paradigma ilmu. Dengan demikian maka paradigma ilmu berperan penting dalam proses perkembangan suatu keilmuan karena paradigma ilmu dapat digunakan untuk menyusun suatu kerangka keilmuan tertentu. Selain itu paradigma ilmu diperlukan dalam rangka penyelenggaraan uji konsistensi, mengarahkan dan atau menguji konsistensi dari suatu proses

STUDIA ADMINISTRASI

keilmuan. Sejak jaman reconnaissance sampai era globalisasi, setidaknya terdapat empat paradigma ilmu yang berhasil dikembangkan oleh para ilmuwan, yaitu positivisme, postpositivisme, critical teori, constructivisme. Hal tersebut menunjukkan bahwa paradigma ilmu telah berkembang menjadi seperangkat keyakinan dasar yang diperlukan dalam membahas hakekat ilmu yang sebenarnya, dan bagaimana cara memperolehnya.

Dalam tahapan epistemologi para penganut konstruktivisme, dikenal sosok Thomas S. Kuhn dengan switch theory atau revolusioner sains / ilmiah pengetahuan. Thomas S. Kuhn menganggap bahwa ilmu haruslah berkembang dan maju secara revolusioner, bukan hanya sekedar kumulatif seperti pendapat-pendapat terdahulu. Perkembangan ilmu secara revolusioner tersebut pada tahap awal akan terkait dengan topik pembahasan paradigma, yaitu bagaimana para ilmuwan menggunakan cara pandang terhadap dunia dan aspek-aspek yang berpengaruh serta contoh-contoh hasil dari implementasi suatu bidang ilmiah tertentu. Pembeneran suatu teori yang dihasilkan tidak hanya ditentukan dari metode verifikasi atau falsifikasi semata, namun akan tergantung dari paradigma baru yang berkembang saat itu. Sejalan dengan hal tersebut, maka heuristik mulai berperan penting dalam suatu metode pembaharuan suatu ilmu. Dalam konteks tersebut, selalu terjadi pergesean dari setiap tahun, sehingga para ilmuwan seperti Kuhn juga mengalami kesulitan dalam menentukan redefinisi tunggal yang berhubungan dengan suatu paradigma yang dianggap baik.

Kondisi tersebut sejalan dengan ilmu yang terkait dengan pembangunan kapabilitas pasukan pemelihara perdamaian PBB. Dalam pembangunan kapabilitas pasukan pemelihara perdamaian PBB, mencakup semua aspek yang terkait dengan ilmu kapabilitas, pemberdayaan sumber daya personel dan materiil, kepemimpinan serta spektrum ancaman yang dihadapi. Berbagai teori yang terkait dengan beberapa spek dalam pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian tersebut berkembang dengan sangat dinamis, karena perubahan tantangan tugas yang dihadapi, yaitu dari pelibatan pasukan perdamaian dalam operasi yang bersifat tradisional berubah menjadi multidimensional. Walaupun perubahan sifat operasi telah terjadi dan difahami, namun perubahan mekanisme pembangunan kapabilitas tidak berubah secara merta, sehingga terjadi banyak kendala. Tatkala perubahan mekanisme guna mengantisipasi perubahan sifat operasi telah dilaksanakan pada tataran strategis, yakni di markas besar PBB, maka kendala dapat dimitigasi oleh negara kontributor yang menerapkan mekanisme tersebut.

STUDIA ADMINISTRASI

Dan sebaliknya jika tidak melaksanakan penyesuaian dengan kebijakan tersebut, maka kendala tetap terjadi dan bahkan dapat tertinggal dalam sistim penentuan suatu pasukan dari negara-negara kontributor.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan transformasi paradigma Thomas S.Kuhn terhadap operasi pemelihara perdamaian dunia. Sebagai bidang ilmu yang dinamis, operasi pemeliharaan perdamaian dunia menjadi sangat urgent dibahas seiring dengan pesatnya dinamika perkembangan lingkungan global yang mengarah pada terjadinya fenomena perkembangan lingkungan strategis (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity/VUCA). Terkait dengan pesatnya dinamika tersebut, maka penulis berhipotesa bahwa terdapat relevansi kuat antara paradigma Kuhn dan operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

Pemikiran Thomas S. Kuhn tentang Ilmu dan Perkembangannya

A Setyo Wibowo (2022) menggambarkan pemikiran Thomas S. Kuhn tentang ilmu dan perkembangannya dilatarbelakangi dari respon Kuhn sendiri terhadap pandangan para pemikir aliran Positivisme dan Popper. Secara umum Thomas S. Kuhn menolak pandangan dari pemikir Positivisme yang menganggap bahwa pengetahuan terhadap suatu fakta objektif dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Para pemikir Positivisme juga mengklaim bahwa para pengikut aliran idealisme yang menggunakan berbagai pendekatan metafisika dalam memandang suatu realitas telah menimbulkan kekacauan dalam ilmu pengetahuan, dikarenakan pemakaian bahasa yang secara esensi tidak bermakna. Selain itu Kuhn juga tidak sependapat dengan para Positivis yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman hidup manusia yang telah melalui proses verifikasi dan konfirmasi eksperimen dari bahasa ilmiah dianggap sebagai langkah dan proses dari perkembangan suatu ilmu. Menurut Kuhn, jika dipandang dari perspektif sejarah atau sejarah ilmu, maka sejarah ilmu dapat dianggap sebagai suatu starting point dari suatu pengembangan ilmu. Hal tersebut dikarenakan sejarah ilmu merupakan rekaman dari akumulasi suatu konsep yang dikembangkan untuk melihat hubungan antara suatu ilmu dengan mitos yang berkembang saat itu. Sejarah ilmu tersebut digunakan oleh para pemikir saat itu untuk memperoleh atau

STUDIA ADMINISTRASI

menyusun suatu ilmu pengetahuan dan kejadian ilmiah yang telah terjadi. Setiap penemuan baru pada suatu masa dijadikan sebagai suatu komponen penting yang dibutuhkan dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan pada masa-masa selanjutnya.

Sedangkan penolakan Kuhn terhadap pandangan Popper khususnya terkait dengan falsifikasi dan refutasi sebagai suatu proses dalam perkembangan suatu ilmu. Bahwa proses perkembangan ilmu yang menurut Popper harus mengandung salah satu proses falsifikasi yakni suatu proses eksperimental yang digunakan dalam membuktikan suatu ilmu atau refutasi yakni suatu penolakan atau penyangkalan suatu teori atau ilmu tidak sepenuhnya dapat diterima. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui perbedaan pandangan Kuhn dan Popper terkait dengan ilmu dan perkembangannya, dimana Kuhn menggunakan tema yang lebih besar untuk didalami guna mendapatkan pengetahuan lebih banyak, seperti hakekat ilmu yang dijabarkan dalam praktek nyata ataupun digunakan dalam suatu proses analisa terhadap suatu hal yang lebih nyata dan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sejarah ilmu digunakan Kuhn sebagai titik awal dalam memulai suatu penelitian, sehingga pada prinsipnya filsafat ilmu harus mempedomani sejarah ilmu agar para pemikir dapat menemukan hakikat suatu ilmu dengan menggunakan aktifitas ilmiah yang sebenarnya. Hal tersebut berbeda dengan Popper yang cenderung menggunakan sejarah ilmu dalam rangka mempertahankan pendapatnya.

Melalui bukunya *The Structure of Scientific Revolutions*, Kuhn menjelaskan secara detail untuk meyakinkan bahwa dalam upaya menemukan suatu ilmu pengetahuan, maka titik awal yang harus selalu dipegang adalah sejarah ilmu. Perubahan-perubahan penting yang terjadi sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan bukan berdasarkan kepada hasil dari upaya empiris sebagai alat untuk pembuktian bahwa teori atau sistem tertentu salah (falsifikasi), namun terjadi karena adanya revolusi ilmiah yang berlangsung lebih cepat, bukan karena proses yang bersifat kumulatif semata. Sistem keyakinan untuk menggambarkan pandangan Kuhn di atas digambarkan melalui suatu paradigma yang digunakan sebagai suatu kerangka teoritis atau cara pandang seorang ilmuwan untuk memahami fenomena alam yang terjadi. Melalui cara pandang tersebut, maka para ilmuwan sesuai dengan bidang masing-masing berupaya memecahkan semua permasalahan yang ditemukan serta mendapatkan jawaban secara ilmiah secara lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

STUDIA ADMINISTRASI

bidang keilmuan masing-masing. Sebagai contoh dalam mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan atau untuk memahami perkembangan dalam suatu ilmu atau sains maka Kuhn menggunakan cara pandang dalam paradigm ilmu. Sekelompok ilmuwan yang memiliki cara pandang yang sama dinamakan Kuhn sebagai komunitas ilmiah. Sekelompok ilmuwan dalam komunitas ilmiah dalam menganalisis suatu permasalahan menggunakan paradigma yang sama, sehingga asumsi, bahasa, nilai-nilai yang dipedomani, tujuan, norma dan kepercayaan yang digunakan memiliki kesamaan. Dalam pandangan Kuhn secara sederhana dapat dikatakan bahwa revolusi ilmiah merupakan segala bentuk perkembangan nonkumulatif yaitu paradigm lama yang terlebih dulu ada diganti dengan yang baru, baik sebagian ataupun keseluruhan (Munir, 2004).

Teori Paradigma Thomas S. Kuhn

Penjelasan A Setyo Wibowo (2022:67) terhadap pemikiran Kuhn tentang ilmu dan perkembangannya dapat difahami bahwa pergeseran paradigma pada prinsipnya merupakan gambaran proses pikiran manusia secara kreatif untuk menemukan suatu kebenaran dalam bingkai filsafat. Dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, maka ide-ide baru akan muncul secara terus menerus dan berkesinambungan dalam kehidupan manusia, sehingga dapat semakin memajukan peradaban kehidupan manusia. Hal tersebut terjadi karena dalam suatu komunitas ilmiah yang terbangun dengan adanya paradigm, maka manusia dapat membaca, menafsirkan, mengungkap dan memahami berbagai gejala alam melalui fakta-fakta yang telah dikumpulkan secara sistematis dan ilmiah. Hal ini merupakan salah satu aspek pendekatan yang penting dari Kuhn, yakni adanya peranan dari aspek sosiologis masyarakat ilmiah serta penggunaan pandangan filosofis dalam menghadapi suatu kritik berdasarkan sejarah ilmu.

Lebih jauh, *the Structure of Scientific Revolutions dan Postscript* yang mengungkapkan modifikasi pandangannya serta tanggapan terhadap kritik, Kuhn membagi tiga tahapan tentang ilmu, yaitu tahap normal science, tahap terjadinya anomali ilmu dan tahap revolusi ilmiah. Pada tahap normal science, para ilmuwan tidak bersifat kritis terhadap paradigma yang dipegangnya, dan bahkan menjabarkan dan mengembangkan paradigma yang dipegangnya tersebut secara

STUDIA ADMINISTRASI

lebih rinci dan semakin mendalam. Namun demikian, dalam proses pengembangan tersebut mulai menemui berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan paradigma yang digunakan, sehingga mulai muncul ketidaksesuaian antara fenomena yang timbul dengan paradigma yang digunakan atau disebut anomali. Selanjutnya tahap kedua muncul sebagai akibat semakin banyaknya anomaly yang timbul, sehingga menumbuhkan krisis kepercayaan terhadap paradigma dari para ilmuwan. Krisis kepercayaan tersebut berdampak terhadap keluarnya para ilmuwan dari jalur ilmu norma setelah melalui proses pengecekan dan pertanyaan-pertanyaan terhadap kebenaran dari paradigma tersebut. Selanjutnya dalam tahap ketiga atau revolusi ilmiah, para ilmuwan mengembangkan paradigam baru yang diyakini dapat memecahkan permasalahan tidak dapat dipecahkan oleh paradigma yang sebelumnya.

Namun demikian pendapat Kuhn dikritik oleh Larry Laudan dalam Yeremias Jena (2012:171) sebagai “local undertermination.” Hal tersebut dikarenakan Laudan menilai pemikiran Kuhn menimbulkan ambiguitas pada standar-standar argument yang *dibagikan* (*the ambiguity of shared standards’ argument*), adanya inkonsistensi secara kolektif atas aturan pendapat (*the collective inconsistency of rules’ argument*), dan adanya perubahan standar argument yang digunakan (*the shifting standards’ argument*). Lebih lanjut, Laudan dalam Yeremias Jena (2012:175) berpendapat bahwa perbedaaan paradigma yang dipedomani para ilmuwan pada prinsipnya terletak pada masalah mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, bukan pada urgensi pemecahan masalah itu sendiri. Sehingga, walaupun memiliki paradigma yang berbeda, semua berpendapat sama bahwa masalah yang ada harus dipecahkan.

METODE

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan data sekunder dari berbagai macam sumber baik itu buku, jurnal nasional dan internasional serta artikel lain yang terkait yang di rangkai dan analisis sehingga menjadi sebuah artikel jurnal.

STUDIA ADMINISTRASI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Operasi Pemelihara Perdamaian atau Peacekeeping Operation (PKO)

Operasi Pemelihara Perdamaian atau Peacekeeping Operation (PKO) telah terbukti sebagai salah satu alat penjaga perdamaian dan keamanan internasional yang cukup efektif. Dirjen Multilateral Kemlu (2020:7-8), berpendapat bahwa terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan PKO, peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia telah dinilai berhasil. Saat ini PBB menggelar dua belas misi PBB di seluruh dunia, dan setengahnya merupakan misi perdamaian yang dilaksanakan di benua Afrika, yaitu MINURSO di Sahara Barat, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, MINUSMA di Mali, MONUSCO di Republik Demokratik Kongo (DRC), UNISFA di Abbey dan UNMISS di Sudan Selatan. Dalam rangka menjalankan perannya untuk memelihara perdamaian dunia, PBB menghadapi dinamika konflik yang cukup signifikan, khususnya dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut sejalan dengan dinamika perkembangan global yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan merubah pola dan sistem kehidupan di semua bidang kehidupan manusia di dunia. Kondisi tersebut, setidaknya telah menyebabkan tiga tahapan perubahan pola dan sistem operasi pemeliharaan perdamaian dunia yang berimplikasi terhadap penyiapan pasukan perdamaian PBB (*UN Force Generation*).

Pemeliharaan perdamaian dan penegakan perdamaian adalah konsep yang berasal dari Piagam PBB PBB. Antara lain, Piagam PBB didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, non-intervensi dan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Meskipun pemeliharaan perdamaian tidak diatur secara eksplisit dalam Piagam, itu telah berkembang sejak 1945 menjadi konsep yang dikembangkan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang disepakati. Dengan berakhirnya Perang Dingin, PBB dengan sukarela mengambil peran baru dan lebih agresif sebagai penegakan perdamaian. Kecenderungan Dewan Keamanan untuk mengesahkan intervensi kemanusiaan, bagaimanapun, telah menyebabkan anomali -- penjaga perdamaian, umumnya dipandu oleh prinsip netralitas dan secara tradisional terbatas pada pertahanan diri, semakin menemukan diri mereka dalam peran yang lebih agresif sebagai penegak perdamaian. Sifat dinamis dari operasi bantuan kemanusiaan telah menghasilkan

STUDIA ADMINISTRASI

mandat yang berkembang secara bertahap bagi otoritas penjaga perdamaian untuk menggunakan kekuatan. Ketika tujuan mereka berubah dan otoritas mereka untuk menggunakan kekuatan berubah, misi penjaga perdamaian menjadi semakin tidak memihak dan lebih tegas.

Paradigma Tahapan Normal Science: Operasi Pemelihara Perdamaian Dunia Tradisional

Pada tahap pertama, pola operasi yang merupakan normal science dilaksanakan dalam bentuk pola operasi pemelihara perdamaian dunia secara tradisional (traditional peacekeeping operations). Pelaksanaan misi PBB menggunakan pola tersebut, dilaksanakan selama kurang lebih selama tujuh dekade. Pada saat pertama atau traditional peacekeeping operations maka secara umum penyelenggaraan operasi didasarkan kepada pengertian peacekeeping dalam buku *The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping*, yakni

“...an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the ‘enforcement action’ of the United Nations under Article 42.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaksanaan operasi pemelihara perdamaian dilaksanakan dengan melibatkan personel militer namun bukan militer berkemampuan daya serang. Pelibatan negara kontributor dalam operasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kesediaan (consent) dari negara pihak dan melalui kerja sama. Dalam konteks penggunaan kekuatan tidak dianggap sebagai operasi pemelihara perdamaian, namun bentuk dari enforcement yang diatur dalam Artikel 42 pada Piagam PBB.

Secara umum tugas pokok dari suatu operasi pemelihara perdamaian ada dua, yakni: untuk menghentikan konflik dan membantu menciptakan kondisi yang diperlukan dalam upaya menciptakan perdamaian (peacemaking) agar dapat berjalan serta mengawasi implementasi suatu perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak bertikai melalui proses negosiasi sebelumnya. Operasi pemeliharaan perdamaian tersebut dimaksudkan sebagai

STUDIA ADMINISTRASI

operasi yang bersifat sementara dan jangka waktu yang pendek, sampai dengan batas waktu kesepakatan perdamaian sesuai perjanjian dapat dicapai. Dan untuk itulah maka dalam operasi pemelihara perdamaian PBB dilaksanakan secara seiring dengan proses menciptakan perdamaian (peacemaking), dimana melalui peacemaking diharapkan tercipta situasi yang memungkinkan proses negosiasi dan peacekeeping dapat berjalan sesuai perjanjian damai. Dan sebaliknya peacekeeping dilaksanakan untuk memperkuat upaya pelaksanaan peacemaking setelah perjanjian damai disepakati pihak bertikai, khususnya dalam melaksanakan gencatan senjata dan bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam operasi pemelihara perdamaian.

Dalam konsep penyelenggaraan *traditional peacekeeping*, operasi pemelihara perdamaian dunia diselenggarakan dengan penyebaran pasukan militer bersenjata maupun militer bersenjata sebagai military observer di antara negara-negara yang mengalami konflik. Hal tersebut diselenggarakan dalam rangka menjamin pelaksanaan gencatan senjata dan tidak ada pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana secara umum terkait dengan fungsi dan keahlian dari personel militer.

Mengingat konsep penyelenggaraan operasi pemelihara perdamaian PBB bersifat tradisional menjalankan tugas relatif berhubungan dengan permasalahan militer, maka penyiapan pasukan perdamaian PBB juga cenderung lebih sederhana. Secara umum yang diperlukan adalah personel dan pasukan yang memiliki kemampuan militer dengan tugas-tugas sesuai dengan tugas-tugas baku sebagai militer dan diatur dalam aturan pelibatan atau rule of engagement yang telah difahami oleh seluruh personel yang dilibatkan dalam operasi pemelihara perdamaian tersebut. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, tentunya penyiapan kapabilitas pasukan perdamaian PBB dapat dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat. Bahkan deployment pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam misi United Nations Emergency Force (UNEF) I ke Terusan Suez pada tahun 1956 hanya membutuhkan tujuh hari, misi United Nations Mission in the Congo (ONUC) ke Kongo pada tahun 1960 dipersiapkan dalam waktu tiga hari dan bahkan pada misi UNEF II pada tahun 1973 hanya dalam waktu 24 jam.

STUDIA ADMINISTRASI

Anomali Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia Tradisional: Tradisional Vs. Multidimensional

Tahapan berikutnya merupakan tahapan transisi, dimana terdapat beberapa evaluasi atas penyelenggaraan operasi perdamaian dunia dan menuntut PBB untuk merubah pola operasi perdamaian di seluruh negara konflik yang melibatkan pasukan PBB. Dengan semakin berkembangnya ilmu hubungan internasional, khususnya paska perang dunia II dan Paska Perang Dingin, maka secara langsung berdampak kepada operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Tidak Semua konflik internasional yang melibatkan pasukan PBB dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, seperti sebelumnya. Dalam beberapa situasi, penggunaan kekuatan militer sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian. Tidak hadirnya kekuatan militer dalam situasi yang sebenarnya diperlukan, tidak hanya berakibat pada timbulnya korban sipil namun juga berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan misi perdamaian PBB di suatu negara serta menurunnya kepercayaan terhadap peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Lebih lanjut pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian yang dimaksudkan sebagai operasi yang bersifat sementara dan jangka waktu yang pendek, cenderung berjalan jauh lebih lama, bahkan ada operasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade, seperti yang dilaksanakan di Demokratik Republik Kongo dan Afrika Tengah. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB juga relatif tidak dapat dilaksanakan secara seiring dengan proses menciptakan perdamaian (peacemaking). Pelaksanaan gencatan senjata seringkali tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena terdapat banyak faktor lain yang menentukan kualitas kepercayaan dari para pihak yang bertikai. Menurunnya tingkat kepercayaan tersebut, tidak hanya berakibat terhadap munculnya kembali konflik bersenjata, namun juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan terhadap eksistensi PBB dalam upayanya menciptakan perdamaian di negara tersebut. Pada situasi tertentu bahkan sering salah satu atau beberapa pihak yang bertikai menganggap pasukan pemeliharaan perdamaian PBB yang bertugas di wilayah mereka sebagai musuh yang dapat diserang dengan kekuatan bersenjata.

Sejalan dengan peningkatan konflik intra-state, khususnya pada paska perang dingin, maka penyelenggaraan operasi pemeliharaan perdamaian dunia diselenggarakan dengan penyebaran pasukan militer bersenjata maupun militer bersenjata sebagai military observer di

STUDIA ADMINISTRASI

antara negara-negara yang mengalami konflik kurang lagi relevan. Hal tersebut dikarenakan karakter konflik paska perang dingin berkembang lebih kompleks dan bersifat multidimensional. Kompleksitas permasalahan dalam konflik dan sifat operasi pemelihara perdamaian yang multidimensional tidak dapat diatasi hanya oleh militer. Kondisi tersebut menuntut peran aktor lain selain militer yang lebih banyak, seperti politikus, akademisi, praktisi hukum, polisi dan lain-lain sesuai kebutuhan di daerah operasi. Para aktor tersebut diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas selain operasi militer, seperti pemilihan umum, reformasi keamanan, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, perlindungan warga sipil khususnya wanita dan anak-anak, serta penguatan sektor politik dan pertahanan keamanan.

Terkait dengan semakin kompleksnya tantangan tugas yang dihadapi serta sifatnya yang multidimensional, maka penyiapan pasukan pemelihara perdamaian dan semua komponen lain yang terlibat memerlukan waktu yang relatif panjang. Tidak seperti saat penyiapan pasukan pada misi PBB UNEF I dan II serta yang ke Kongo, maka penyiapan pasukan dan komponen lain harus dilaksanakan dengan lebih baik dan membutuhkan peran dari berbagai pihak. Pelaksanaan latihan sebelum deployment dan selama di daerah misi juga harus dibuat standar latihan tertentu, baik dalam konteks cakupan modul atau materi latihan, metode latihan dan standar pelatih serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perubahan pola penyiapan pasukan tersebut secara revolusioner diterapkan setelah pada tahun 1992 Sekjen PBB, Boutros Boutros Gali meluncurkan Agenda for Peace, yang menuntut semua negara anggota PBB untuk menjamin dukungan terhadap sistem pengaturan pasukan yang siap gerak, yaitu United Nations Standby Arrangements System (UNSAS). Melalui sistem tersebut, PBB berharap dapat mengamankan personel dan sumber daya yang diperlukan dalam operasi pemelihara perdamaian. The Standby Arrangements management team yang didirikan pada tahun 1994 mengidentifikasi kebutuhan operasi-operasi pemelihara perdamaian PBB, menyusun standar kesiapan, melaksanakan negosiasi dengan negara yang berpotensi untuk menyumbangkan personel dan sumber dayanya, menyusun database sumber daya yang ada serta membantu proses perencanaan suatu misi perdamaian PBB.

Jika suatu negara donor tidak mengikuti sistem tersebut, maka secara konseptual tidak dapat dipilih untuk berangkat menjalankan tugas pemelihara perdamaian PBB. Resiko yang

STUDIA ADMINISTRASI

kemungkinan muncul jika sistem UNSAS tidak diikuti oleh negara kontributor adalah terjadinya insiden-insiden yang mengakibatkan kerugian personel maupun materiil. Kerugian yang terjadi tersebut, tidak saja berdampak terhadap personel atau negara kontributor terkait, namun juga terhadap eksistensi misi PBB di daerah operasi maupun citra PBB secara umum. Di sisi lain, pelibatan negara-negara donor dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia tidak dapat dipisahkan dari identitas tiap negara tersebut. Setiap negara anggota PBB memiliki kewajiban dalam upaya perdamaian dunia, sebagai mana dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 5, yakni “Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada PBB dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada sesuatu negara yang oleh PBB dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan.” Namun demikian, setiap negara juga berhak mempertahankan identitas negara dan kaveat yang ditetapkan dalam Undang-Undang di negaranya, seperti Indonesia akan berpegang kepada prinsip politik luar negeri yang Bebas Aktif. Sebagai contoh Indonesia, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif tidak akan melibatkan diri dalam penggunaan kekuatan militer untuk menyerang salah satu pihak yang bertikai.

Paradigma Baru: Operasi Pemelihara Perdamaian Dunia Bersifat Multidimensional *(multidimensional peacekeeping operations)*

Tahap ketiga adalah implementasi pola operasi yang berorientasi kepada cakupan dimensi yang lebih luas atau multidimensi (*multidimensional peacekeeping operations*). Adam Day (2021:1) berpendapat bahwa operasi Pemelihara Perdamaian yang semula memiliki tugas utama untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan gencatan senjata dan kesepakatan damai antar negara yang bertikai telah berubah dalam operasi perdamaian modern dalam bentuk mengatasi konflik dalam suatu negara yang melibatkan negara lain, negara gagal (*failed state*) atau negara rapuh (*fragile state*), yang dalam pelaksanaannya melibatkan penggunaan kekuatan asimetris, termasuk di dalamnya dari kelompok teroris dan radikal. Revolusi paradigma operasi perdamaian dunia bersifat multidimensi saat ini tertuang dalam seluruh Mandat PBB dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan PBB. Tugas dan peran yang bersifat multidimensional tersebut, diantaranya meliputi perlindungan warga sipil termasuk anak dan

STUDIA ADMINISTRASI

perempuan dari korban kekerasan dan pelecehan seksual (Protection of Civilian/POC, child protection, sexual harrasment), pemantauan hak asasi manusia, mendukung pelaksanaan Security Sector Reform (SSR) di negara yang dilanda konflik, mendukung program perlucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi/DDR, melindungi aset PBB dan mendukung akses bantuan kemanusiaan. Selain itu, dalam operasi pemelihara perdamaian dunia saat ini juga berhadapan dengan adanya peningkatan konflik yang bersifat asimetris, penggunaan ancaman siber, keterlibatan jaringan teroris internasional, serta dampak dari adanya wabah penyakit menular, seperti Ebola dan Covid-19.

Berdasarkan *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations* (2003:10), multidimensional yang dimaksud dalam operasi pemelihara perdamaian, selain membantu implementasi perjanjian damai dan gencatan senjata juga mencakup tugas-tugas lain yang jauh lebih kompleks, diantaranya membantu negara atau wilayah pihak bertikai untuk menuju transisi pemerintahan yang stabil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, good governance, dan pembangunan ekonomi serta dalam rangka proses transisi tersebut menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sementara. Walaupun peran militer masih vital dalam hampir semua operasi, namun peran non-militer meningkat signifikan dalam operasi perdamaian multidimensional, diantaranya: dalam pelaksanaan fungsi liaison terhadap para politisi dan masyarakat sipil, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, bantuan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan ke kehidupan normal, memberikan supervisi atau menyelenggarakan Pemilu, penguatan fungsi penegakan hukum dan HAM, bantuan rehabilitasi paska konflik serta menyiapkan administrasi pemerintahan menuju kemerdekaan. Pelibatan personel dari berbagai entitas PBB juga diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dalam operasi pemelihara perdamaian, seperti *the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *the World Food Programme (WFP)*, *the United Nations Children's Fund (UNICEF)*, *the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*, *the United Nations Development Programme (UNDP)* dan *the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*.

Sejalan dengan perubahan paradigma yang digunakan dalam operasi pemelihara perdamaian dunia, dari traditional peacekeeping operation menjadi multidimensional peacekeeping operation, maka pola operasi yang diselenggarakan dirubah menjadi lebih

STUDIA ADMINISTRASI

modern. Modernisasi operasi pemelihara perdamaian dilaksanakan tidak hanya terhadap Alutsista/Alut berbasis teknologi tinggi, namun juga dalam hal mekanisme dan manajemen penggelaran operasi, modernisasi doktrin, penguatan tehnik dan taktik, manajemen pengelolaan sumber daya, sistim penganggaran, serta standarisasi kemampuan para personel yang terlibat dalam operasi, baik militer maupun non-militer. Perubahan paradigma tersebut sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari Tim Panel eksternal PBB yang diketuai oleh Lakhdar Brahimi, mantan Menteri Luar Negeri Aljazair pada bulan Agustus 2000 dan dikenal dengan the Brahimi Report. The Brahimi Report tersebut berisi 57 rekomendasi secara eksplisit kepada Sekjen PBB, Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB dan juga seluruh negara anggota PBB tentang perhatian khusus kepada strategi, politik dan hal-hal dasar yang terkait dengan operasi perdamaian. Beberapa poin penting dalam the Brahimi Report, diantaranya adalah:

- Operasi pemeliharaan perdamaian harus menjadi bagian dari strategi yang lebih komprehensif dalam penyelesaian konflik, termasuk didalamnya terkait dengan politik, ekonomi, pembangunan, pengembangan kelembagaan, kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang harus melibatkan bagian lain dari PBB, baik badan PBB, Negara Anggota dan organisasi internasional lainnya,
- Strategi komprehensif harus mempertimbangkan dimensi regional untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai dalam mengatasi masalah penyebab konflik tidak dirusak oleh masalah di negara tetangga,
- Dewan Keamanan PBB harus memastikan bahwa mandat dapat dicapai (achievable), termasuk dalam mengesahkan pengerahan pasukan dalam jumlah yang sesuai untuk melaksanakan mandat misi dan kontribusi pasukan dari Negara Anggota yang terlatih dan dilengkapi,
- Kredibilitas dan kemampuan misi untuk mengimplementasikan mandatnya seringkali ditentukan sejak tahap awal, sehingga pengerahan rapid deployment dari personel dan material sangat penting.
- Negara-negara Anggota harus siap untuk bekerja sama dan berkomitmen untuk pemeliharaan perdamaian dalam waktu yang cukup lama untuk mendukung pelaksanaan konsolidasi di negara yang baru pulih dari perang.

STUDIA ADMINISTRASI

- Personel staf internasional PBB di semua tingkatan, baik di Markas Besar maupun di daerah misi, harus menjalankan fungsinya dengan profesionalisme, kompetensi dan integritas.

Dalam rangka menjamin penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian di daerah misi, PBB juga harus menetapkan mekanisme evaluasi secara komprehensif di daerah misi. Beberapa kegiatan untuk evaluasi di daerah misi yang diselenggarakan PBB tersebut, diantaranya melalui Military Capability Studies, Contingent Owned Equipment/COE Inspection, Operational Readiness Inspection dan laporan dari misi lainnya. Hasil dari evaluasi tersebut akan menentukan urgensi perubahan pola operasi, perubahan tuntutan tugas dan kemampuan yang harus dimiliki serta perubahan jenis Peralatan dan peralatan pendukungnya. Dalam situasi yang pada akhirnya terjadi perubahan secara signifikan yang menimbulkan anomali dan krisis, maka perlu kembali diadakan revolusi paradigma secara ilmiah untuk tetap menjaga eksistensi PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Transformasi Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Operasi Pemelihara Perdamaian Dunia

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa antara paradigma Thomas S. Kuhn atau *switch theory* dengan perkembangan operasi pemelihara perdamaian dunia memiliki relevansi yang kuat. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang ditemukan bahwa secara umum ilmu yang terkait dengan operasi pemelihara perdamaian dunia memenuhi dalil bahwa suatu ilmu berkembang dalam suatu revolusi ilmiah haruslah melalui beberapa tahapan ujian. Ilmu yang terkait dengan operasi pemelihara perdamaian dunia telah terbukti berkembang seiring dengan dinamika perkembangan sejarah ilmu pada umumnya serta telah terjadi revolusi ilmiah dari masa ke masa. Operasi pemelihara perdamaian dunia juga telah terbukti menghadapi beberapa tantangan yang diberikan oleh Thomas S. Kuhn. Tahapan ilmiah yang dilewati dalam operasi pemelihara perdamaian dunia, sehingga dapat membentuk paradigma ilmu baru, adalah sebagai berikut:

STUDIA ADMINISTRASI

Pertama, pemikiran Tomas S. Kuhn tentang paradigma dapat difahami sebagai dasar pijakan para ilmuwan untuk menentukan landasan berfikir, baik dalam hal filosofi ilmu maupun teori ilmu pengetahuan. Paradigma tersebut memberikan arah dan cara pandang para ilmuwan dalam melihat suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi. Perkembangan wacana terkait paradigma terjadi secara dialektik dan interaktif, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembentukan suatu paradigma ilmiah maupun penolakan terhadap suatu paradigma ilmiah yang telah berkembang sebelumnya. Dalam konteks operasi pemelihara perdamaian dunia, maka paradigma lama yang telah mengakar hampir selama tujuh decade telah mengakar tentang paradigma *traditional peacekeeping*. Selama masa tersebut, semua ilmuwan yang membahas tentang operasi pemelihara perdamaian dunia cenderung melihat bagaimana pola operasi yang diselenggarakan oleh PBB di Negara manapun dengan cara pandang tradisional, yaitu bahwa penyelenggaraan operasi pemelihara perdamaian diselenggarakan untuk meyakinkan bahwa perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak yang bertikai, termasuk upaya gencatan senjata dapat diimplementasikan semua pihak. Selain itu, semua metode, cara, mekanisme dan instrument yang digunakan dibahas dalam rangka pencapaian tujuan perdamaian dengan kaca mata pandang *traditional peacekeeping*. Namun demikian, melalui proses dialektika dan interaktif yang sangat intens, khususnya terkait dengan ruh operasi pemelihara perdamaian dan dikaitkan dengan perkembangan dinamika global yang sangat cepat, paradigma yang muncul memicu para ilmuwan untuk berfikir progresif untuk menjamin bahwa perdamaian dan keamanan dunia dapat terjaga.

Kedua, bahwa pemikiran Thomas S. Kuhn tentang normal science dapat difahami tatkala suatu paradigma yang ada bersifat dominan dan dijadikan pedoman untuk diikuti dalam pembahasan keilmuan. *Normal science* tersebut dijadikan juga sebagai indikator keabsahan suatu teori, sehingga teori dikembangkan berdasarkan paradigma yang ada. Dalam konteks operasi pemelihara perdamaian, maka normal science didasarkan pada paradigm *traditional peacekeeping* yang penyelenggaraanya didasarkan pada Piagam PBB, dimana pelibatan Negara kontributor harus berdasarkan prinsip sukarela dan atas dasar kesediaan para pihak serta bersifat sementara. Pola operasi yang diselenggarakan juga tidak melibatkan militer berdaya serang, namun lebih kepada upaya penghentian konflik melalui pengawasan implementasi perjanjian damai dari pihak bertikai. Walaupun dominan melibatkan personel

STUDIA ADMINISTRASI

militer, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, pelaksanaan operasi pemelihara perdamaian dilaksanakan sejalan dan saling menguatkan dengan proses menciptakan perdamaian (*peacemaking*).

Ketiga, bahwa Pemikiran Thomas S. Kuhn tentang anomali dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakselarasan antara paradigim yang dipedomani para ilmuwan dengan kenyataan yang ada. Paradigma yang ada tidak dapat menjelaskan fenomenan yang terjadi. Berbagai persoalan yang muncul juga tidak dapat dijawab oleh paradigim yang ada. Dalam situasi ini maka terjadi suatu proses yang mengakibatkan anomali dan berlanjut kepada krisis ilmiah yang mengarah kepada revolusi ilmiah. Anomali dalam konteks operasi pemelihara perdamaian terjadi karena perkembangan lingkungan global yang sangat cepat dan dinamis. Selain itu peningkatan konflik intra-state, paska perang dingin, keterlibatan non state actors, dampak perkembangan teknologi modern dan wabah penyakit juga tidak dapat lagi dihadapi dengan paradigim traditional *peacekeeping*. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan pengerahan personel militer. Pada tahapan ini, maka operasi pemelihara perdamaian dari sudut pandang paradigim traditional *peacekeeping* mengalami krisis.

Keempat, bahwa pemikiran Kuhn terkait revolusi ilmu (*scientific revolution*) dapat digambarkan dengan munculnya letupan-letupan perubahan secara drastis yang terjadi karena adanya krisis kepercayaan terhadap paradigim yang ada. Letupan yang terjadi pada revolusi ilmiah pada hakikatnya juga dapat diartikan sebagai titik pandang baru yang terus diperbandingkan dengan *normal science*. Dari hasil perbandingan tersebut maka muncul paradigim baru yang pada dasarnya menjadi cabang teori yang baru. Revolusi ilmiah dalam konteks operasi pemelihara perdamaian dapat digambarkan dengan adanya perubahan paradigim dari traditional *peacekeeping* menjadi multidimensional *peacekeeping*. Atas krisis ilmiah yang terjadi dalam paradigim lama pada konteks operasi pemelihara perdamaian, terdapat teori baru sebagai hasil dari revolusi ilmiah yang dapat menjawab berbagai persoalan dalam operasi pemelihara perdamaian. Cakupan paradigim operasi pemelihara perdamaian bersifat multidimensional, tergambar dalam spektrum tugas dan tuntutan kemampuan dalam menghadapi tugas tersebut, diantaranya *Protection of Civilian/POC*, *child protection*, *sexual harrasment*, penegakan hukum dan hak asasi manusia, *Security Sector Reform*, pelaksanaan

STUDIA ADMINISTRASI

perlucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi/DDR, melindungi aset PBB dan mendukung akses bantuan kemanusiaan sertaantisipasi ancaman konflik asimetris, siber, terorisme internasional dan wabah penyakit menular.

KESIMPULAN

Paradigma Thomas S. Kuhn atau *switch theory* memiliki relevansi yang cukup kuat dengan perkembangan operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Konsep revolusi ilmiah Thomas S. Kuhn berpengaruh dalam proses konstruksi maupun rekonstruksi munculnya ilmu pengetahuan baru, termasuk didalamnya ilmu yang menyangkut dengan operasi pemeliharaan perdamaian. Senada dengan pandangan Thomas Kuhn bahwa kajian permasalahan fundamental dalam epistemologi keilmuan menggunakan sejarah ilmu sebagai starting point-nya. Paradigma traditional peacekeeping tidak mampu lagi menjawab berbagai permasalahan yang timbul akibat perubahan spectrum tugas dan ancaman yang semakin kompleks sebagai dampak dari perkembangan global yang sangat cepat dan tidak menentu. Berbagai persoalan timbul, baik dalam konteks peningkatan kualitas dan kuantitas Alut/Alutsista modern, kualitas doktrin, manajemen penggelaran operasi, ketersediaan anggaran, pengelolaan sumber daya yang ada serta kualitas personel dan materiil pendukung lainnya. Sebagai dampak dari berbagai persoalan di atas, beberapa insiden sering terjadi dan berdampak terhadap kerugian personel dan materiil, tujuan dan sasaran operasi tidak tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan, serta terjadi penurunan kepercayaan sebagian masyarakat dunia kepada PBB. Kondisi di atas merupakan gambaran adanya anomali dalam paradigma *traditional peacekeeping* sehingga menuntun terjadinya revolusi ilmiah dan menimbulkan paradigma baru dalam operasi pemeliharaan perdamaian yaitu *multidimensional peacekeeping*. Paradigma *multidimensional peacekeeping*, tidak terlepas dari 57 rekomendasi Tim Panel eksternal PBB yang diketuai oleh Lakhdar Brahimi, yang dikenal dengan the Brahimi Report pada bulan Agustus 2000. Paradigma baru multidimensional Peacekeeping, kini telah menggantikan paradigma traditional peacekeeping dan melahirkan ilmu baru tentang operasi perdamaian, yang

STUDIA ADMINISTRASI

membahas semua hal terkait strategi, politik dan hal-hal dasar yang terkait dengan penyiapan, pelatihan, penyelenggaraan operasi perdamaian serta pemenuhan kebutuhan logistiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Setyo Wibowo (2022). Cara Kerja Ilmu Filsafat dan Filsafat Ilmu. Bogor: Grafika Mardi Yuana.

Adam Day (2021), The Future of UN Peacekeeping Operations in a changing conflict environment,

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/future_of_peacekeeping_operations_in_a_changing_conflict_environment.pdf

Department of Peacekeeping Operations (2003). "Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations," https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping-handbook_un_dec2003_0.pdf

Larry Laudan (1996). Beyond Positivism and Relativism. Theory, Method and Evidence. Boulder, CO: Westview Press.

Munir, R. M. & M.(2004). Filsafat Ilmu. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rani Eka Syahputri (2018). "Identitas dan Kepentingan Indonesia Berpartisipasi dalam UN Peacekeeping Operations pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 519-528

Yeremias Jena (2012). "Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan." *Melintas* Vol 20, No. 2, Hal 161-181.